



JURNAL ILMIAH
GEMA PERENCANA

Volume 2, Nomor 3, Januari - April 2024
Halaman 333 - 490

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK -----	i - x
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIMBINGAN MANASIKHAJI BAGI LANSIA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN Sufriadi -----	333 - 354
ANALISIS KRITIS OPTIMALISASI POTENSI DIGITALISASI LAYANAN SESUAI KARAKTERISTIK MASYARAKAT DAN DEMOGRAFI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA Ali Yunan Hutabarat -----	355 - 378
PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN EKSTREM DI BALI MENGGUNAKAN METODE ANALISIS SWOT: STRATEGI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN I Pande Made Ariawan -----	379 - 398
PENINGKATAN LAYANAN KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN LINGGA MELALUI PROGRAM LAYANAN TERAPUNG KEAGAMAAN Setia Budi -----	399 - 422
OPTIMALISASI MODERASI BERAGAMA PENYULUH DAN GURU MELALUI FORUM RUANG PERJUMPAAN Muhammad Ihyakulumudin -----	423 - 442
INEFISIENSI PENERBITAN KARTU NIKAH FISIK PADA LAYANAN PUBLIK DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Ihsan Bayu Merdeka -----	443 - 456

MENUJU HAJI YANG EFISIEN DAN BERKEADILAN: OPTIMALISASI
SISTEM PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN *WAITING LIST* JEMAAH
HAJI DI JAWA BARAT

Marliza ----- 457 - 470

PELAYANAN KEAGAMAAN JEMPUT BOLA OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA KEPULAUAN RIAU DI WILAYAH *HINTERLAND*
KEPULAUAN RIAU

Andi Febriana Hadi Saputra ----- 471 - 486

DAFTAR INDEKS ----- 487 - 490



SALAM REDAKSI

Pembaca Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA yang terhormat,

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa-Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayat-Nya, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** ini dapat terbit kembali sebagai Edisi Lanjutan, yaitu: **Volume 2 Nomor 3, Januari-April 2024**. Setelah mendapatkan E-ISSN (*Electronic-International Standard Serial Number*), saat ini juga sudah memperoleh P-ISSN (*Printing-International Standard Serial Number*) dari Pusat Nasional ISSN Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** telah terdaftar dan mendapatkan Nomor *Digital Object Identifier* (DOI) dari The Crossref.

Jurnal ini dalam pengelolaannya menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA*. Kami berharap, pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih cepat, lebih efektif, dan lebih luas melalui media *online*. Di samping itu, Jurnal ini tetap dicetak secara *hardcopy*, walaupun dengan jumlah halaman dan tiras yang terbatas.

Pada **Volume 2 Nomor 3, Januari-April 2024** ini, **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA** menerbitkan 8 (delapan) artikel, yang kesemuanya berasal dari para Perencana di lingkungan Kementerian Agama RI. Kesembilan artikel tersebut tersaji sesuai dengan ruang lingkup (*scope and focus*) yang telah ditetapkan Tim Editorial **Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA**. Artikel-artikel yang tampil dalam Jurnal ini lebih menekankan pada kajian “Kebijakan Perencanaan” (*Policy paper*) bidang: Sosial, Ekonomi, Spasial, dan Pendidikan, dalam perspektif Agama dan Keagamaan.

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan pembangunan di bidang agama dan pendidikan keagamaan maupun pengembangan pengetahuan di bidang kegiatan masyarakat.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2024

Dewan Redaksi



LEMBAR ABSTRAK

Sufriadi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun

Email: hurrun_80@yahoo.co.id

INGGRIS

THE IMPLEMENTATION ANALYSIS OF THE HAJJ RITUAL GUIDANCE SERVICE POLICY FOR THE ELDERLY AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE KARIMUN REGENCY

This article aims to explain, explain and describe to present answers, provide policy recommendations related to the Implementation of the Hajj Manasik Guidance Policy for prospective Elderly Hajj Pilgrims at the Karimun Regency Ministry of Religion Office, apart from that, as a policy consideration for the Indonesian Ministry of Religion, in order to improve ritual guidance services for elderly Hajj pilgrims. To carry out the analysis, a qualitative method was used, with an approach to three data collection techniques, namely: first, interview technique: data collection technique through direct questions and answers with key informants; second, observation techniques: observing objects directly; and third, document study and literature study techniques. The results of the analysis show that the duties and functions of the Hajj and Umrah Organizing Section of the Karimun Regency Ministry of Religion Office. Based on the results of the analysis, it is known that the implementation of the Hajj ritual guidance service policy at the Karimun Regency Ministry of Religion Office has gone well, however, specifically for elderly Hajj pilgrims, several weaknesses are still found, including the absence of specific regulations regarding services for elderly Hajj pilgrims. Thus, it is concluded that there must be improvements in regulations regarding the implementation of the Hajj ritual guidance service policy at the Karimun Regency Ministry of Religion Office, as a form of improving Hajj and Umrah services that are optimally in line with the "elderly friendly" tagline. Three things that can be recommended in this article include: 1) issuing regulations that specifically regulate the guidance of elderly Hajj rituals as guidelines for Hajj and Umrah Organizers at regional level, 2) carrying out effective activity planning for optimizing elderly-friendly Hajj services, and 3) improve facilities and infrastructure for Hajj ritual guidance services for the elderly.

Keywords: Implementation, Policy, Guidance on Hajj Manasik, Elderly

INDONESIA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN BIMBINGAN MANASIK HAJI BAGI LANSIA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARIMUN

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan untuk menampilkan jawaban, memberikan rekomendasi kebijakan terkait implementasi kebijakan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji lansia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Kementerian Agama RI, dalam rangka meningkatkan pelayanan bimbingan manasik bagi calon jemaah haji lansia. Untuk melaksanakan analisis digunakan metode kualitatif, dengan pendekatan pada tiga teknik pengumpulan data, yaitu: *Pertama*, teknik wawancara: teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan narasumber (*key informant*); *Kedua*, teknik observasi: mengamati objek secara langsung; dan *Ketiga*, teknik studi dokumen dan studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi kebijakan pelayanan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik, namun khusus bagi calon jemaah haji lansia masih ditemukan beberapa kelemahan antara lain belum adanya aturan secara khusus mengenai pelayanan calon jemaah haji lansia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa harus ada perbaikan regulasi terhadap implementasi kebijakan layanan bimbingan manasik haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, sebagai bentuk peningkatan layanan penyelenggaraan haji dan umrah yang sesuai dengan tagline "ramah lansia" secara optimal. Tiga hal yang dapat direkomendasikan dalam artikel ini antara lain: 1) menerbitkan regulasi yang mengatur secara khusus tentang bimbingan manasik haji lansia sebagai pedoman bagi penyelenggara haji dan umrah di tingkat daerah, 2) melakukan perencanaan kegiatan yang efektif bagi optimalisasi layanan haji ramah lansia, dan 3) meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan bimbingan manasik haji bagi lansia.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bimbingan Manasik Haji, Lansia

Ali Yunan Hutabarat

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Email: ali.yunan76@gmail.com

**CRITICAL ANALYSIS OF POTENTIAL
OPTIMIZATION FOR DIGITALIZATION
OF SERVICES ACCORDING TO THE
COMMUNITY AND DEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS OF THE NORTH
SUMATRA PROVINCE**

Digitalization of services is one of the national priority programs, but not all work units can implement this program optimally according to performance targets. One indicator of the failure of digital implementation in public services is the small number of users of digital services compared to conventional services. The purpose of this analysis is to carry out a description and analysis of the digitization of services in all work units within the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of North Sumatra Province and to carry out an analysis of several alternative policies to be used as policies that can be implemented in all regions in North Sumatra Province. This analysis was carried out using a qualitative approach, and analyzed using SWOT analysis. The results of this analysis are: 1) Failure in service digitization policies making have an impact on policy implementation that is not optimal as contained in the output and outcomes in the Strategic Plan; 2) The solution to failure in policy making can be policy updates using SWOT analysis with policy making priorities in accordance with Quadrant II, namely maximizing potential (strength) to minimize threats. Conclusion: policy making is not just the result of thinking by outlining the programs contained in planning documents but requires valid, reliable supporting data and academic analysis.

Keywords: *Digitalization of Services, Potential, SWOT, Policies, National Priorities*

**ANALISIS KRITIS OPTIMALISASI
POTENSI DIGITALISASI LAYANAN
SESUAI KARAKTERISTIK
MASYARAKAT DAN DEMOGRAFI
WILAYAH PROVINSI SUMATERA
UTARA**

Digitalisasi layanan merupakan salah satu program prioritas nasional, tetapi tidak semua satuan kerja dapat mengimplementasikan program tersebut secara optimal sesuai target kinerja. Salah satu indikator gagalnya implementasi digital pada layanan masyarakat adalah sedikitnya pengguna layanan digital dibanding dengan layanan konvensional. Adapun tujuan dibuat analisis ini adalah melakukan deskripsi dan analisa digitalisasi layanan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dan melakukan analisa pada beberapa alternatif kebijakan untuk dijadikan sebagai kebijakan yang dapat diimplementasikan pada seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Utara. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisa menggunakan analisis SWOT. Hasil analisa ini adalah: 1) Kesalahan dalam pembuatan kebijakan digitalisasi layanan berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak optimal sebagaimana terdapat pada *output* dan *outcome* Renstra; 2) Solusi atas kesalahan dalam pembuatan kebijakan dapat dilakukan pembaruan kebijakan menggunakan analisis SWOT dengan prioritas pengambilan kebijakan sesuai Kuadran II, yakni memaksimalkan potensi (kekuatan) untuk meminimalisir ancaman. Kesimpulannya bahwa pembuatan kebijakan bukan hanya hasil pemikiran dengan menguraikan program yang terdapat pada dokumen perencanaan, tetapi membutuhkan data dukung yang valid, reliabel, dan dilakukan analisa secara akademis.

Kata Kunci: Digitalisasi Layanan, Potensi, SWOT, Kebijakan, Orioritas Nasional

I Pande Made Ariawan
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
Email: mdariawan99@gmail.com

**THE ROLE OF THE MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN
ALLEVIATING EXTREME POVERTY
IN BALI USING THE SWOT ANALYSIS
METHOD: STRATEGY AND POLICY
IMPLICATIONS**

In 2023, significant meeting was held in Bali by the Provincial and District/City Poverty Reduction Coordination Team. The aim was to assess the progress of poverty reduction programs, devise integrated strategies across sectors, and expedite poverty alleviation efforts in the region. Despite a relatively low national poverty rate of 4.25%, Bali has seen stagnation above 4% over the past five years, signaling the need for fresh collaborative strategies. Aligned with the Sustainable Development Goals and President's directive to eradicate extreme poverty by 2024, it's crucial to engage the national team, collaborate with Bali Province MDA, and incorporate local wisdom policies. Poverty data is presented using a Basic Needs Approach, encompassing food and non-food poverty lines, along with micro and macro data. The analysis reveals an uptick in poverty during the pandemic, followed by a recovery. The non-food poverty line increasingly influences poverty conditions. Five key food non-food commodities contributing to Bali's poverty line have been identified. The province's poverty depth and severity are also reported. The analysis includes income inequality and population expenditure distribution, concluding that income inequality in Bali is low by World Bank standards. Despite pockets of extreme poverty in some districts, the overall level is relatively low. Social assistance and funding have been distributed, and Bali's concept of poverty encompasses economic, socio-cultural, and environmental aspects. Finally, this policy paper underscores that increasing access and quality of educational services as well as education programs/assistance are right on target through the use of Hindu Punia Fund for education assistance and strengthening non-formal Pasraman through innovation of "Tangan Umat" as the role of the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: *Extreme Poverty, Sustainable Development Goals, Basic Needs Approach, Income Inequality, Social Assistance, Hindu Punia Fund, Non-Formal Pasraman, "Tangan Umat"*

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN
EKSTREM DI BALI MENGGUNAKAN
METODE ANALISIS SWOT: STRATEGI
DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN**

Pertemuan koordinasi Tim Koordinasi Pengurangan Kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023 di Bali diadakan untuk mengevaluasi program pengurangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, merumuskan strategi terpadu lintas sektor, dan mempercepat upaya pengurangan kemiskinan di wilayah tersebut. Meskipun tingkat kemiskinan di Bali relatif rendah secara nasional, sebesar 4,25%, dalam lima tahun terakhir, tingkat kemiskinan di provinsi ini stagnan di atas 4%, menunjukkan perlunya strategi kolaboratif baru. Sesuai mandat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan instruksi Presiden yang menyerukan pengurangan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Maka perlu melibatkan tim nasional, berkolaborasi dengan MDA Provinsi Bali, serta mengintegrasikan kebijakan kearifan lokal. Data kemiskinan disajikan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, termasuk garis kemiskinan pangan dan non-pangan, serta data mikro dan makro. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan selama periode pandemi, namun telah terjadi pemulihan sejak itu. Garis kemiskinan non-pangan berperan semakin besar dalam memengaruhi kondisi kemiskinan. Lima komoditas utama pangan dan non-pangan yang berkontribusi pada garis kemiskinan di Bali telah diidentifikasi. Terdapat informasi tentang kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di provinsi ini. Analisis mencakup ketidaksetaraan pendapatan dan distribusi pengeluaran penduduk. Kesimpulannya bahwa ketidaksetaraan pendapatan di Bali berada dalam kategori rendah menurut standar Bank Dunia. Meskipun masih terdapat kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten, tingkatnya relatif rendah. Bantuan sosial dan pendanaan telah didistribusikan, dan konsep kemiskinan di Bali mencakup aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Akhirnya, *policy paper* ini menekankan bahwa peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta program/bantuan pendidikan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan *Dana Punia Hindu* untuk bantuan pendidikan dan penguatan *Pasraman* non formal melalui inovasi tangan umat sebagai peran Kementerian Agama.

Kata Kunci: *Kemiskinan Ekstrem, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Basic Needs Approach, Ketimpangan Pendapatan, Dana Punia Hindu, Pasraman Nonformal, Tangan Umat*

Setia Budi

Kantor Kemenag Kabupaten Lingga

Email: setiabudicilex@gmail.com

**IMPROVE RELIGIOUS SERVICES
IN THE COASTAL AREA OF LINGGA
DISTRICT THROUGH THE RELIGIOUS
FLOATING SERVICE PROGRAM**

This article discusses the lack of religious services in coastal communities in Lingga Regency, where most of the area is the sea. To overcome this problem, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has innovated services in the form of floating religious services. The purpose of writing this policy text is to outline the extent to which policies are needed to address the inadequate provision of religious services to coastal communities in Lingga Regency. To ensure that this article can answer the above objectives, the author uses a qualitative method with an approach to literature study and interviews in the field. The results show that to improve religious services in coastal communities, 4 (four) approaches are needed, namely: First, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has a policy to provide transportation facilities in the form of ships that will be used for operational religious service activities in coastal areas that have set. Second, the Lingga Regency Ministry of Religion Office prepared a policy for submitting proposals for additional operational budgets for religious services to Echelon 1 of the Ministry of Religion. Third, the Lingga Regency Ministry of Religion Office has a service innovation called the Religious Floating Service Program (LANTERA). Fourth, the Lingga Regency Ministry of Religion Office is preparing human resources and a system for "religious floating services" that are excellent, professional, effective, and efficient according to the needs of coastal communities.

Keywords: Services, religious, Coastal, Floating, Lingga Regency

**PENINGKATAN LAYANAN
KEAGAMAAN DI WILAYAH PESISIR
KABUPATEN LINGGA MELALUI
PROGRAM LAYANAN TERAPUNG
KEAGAMAAN**

Artikel ini membahas mengenai kurangnya layanan keagamaan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga, yang sebagian besar wilayahnya lautan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga melakukan inovasi layanan berupa layanan terapung keagamaan. Tujuan penulisan naskah kebijakan ini adalah untuk menguraikan sejauhmana perlunya kebijakan dalam mengatasi penyelenggaraan layanan keagamaan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Lingga yang belum maksimal. Dalam rangka memastikan bahwa artikel ini mampu menjawab tujuan di atas, maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi pustaka dan wawancara di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam meningkatkan layanan keagamaan pada masyarakat pesisir, maka perlu 4 (empat) pendekatan, yaitu: *Pertama*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mempunyai kebijakan untuk menyediakan sarana transportasi berupa kapal laut yang akan digunakan untuk operasional kegiatan layanan keagamaan di wilayah pesisir yang sudah ditetapkan. *Kedua*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyusun suatu kebijakan pengajuan usulan tambahan anggaran operasional layanan keagamaan kepada Eselon 1 Kementerian Agama. *Ketiga*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga mempunyai suatu inovasi layanan yang dinamakan Program Layanan Terapung (LANTERA) Keagamaan. *Keempat*, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga menyiapkan SDM dan sistem "pelayanan terapung keagamaan" yang prima, profesional, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan bagi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Layanan, Keagamaan, Pesisir Terapung, Kabupaten Lingga

Muhammad Ihyakulumudin
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Email: ihya@kemenag.go.id

**A POLICY PAPER OF OPTIMIZING
RELIGIOUS MODERATION FOR
COUNSELORS AND TEACHERS IN THE
FORUM OF MEETING SPACE**

The main actors of the Ministry of Religious Affairs that should be prioritized for strengthening religious moderation are instructors and teachers. Measuring the implementation of the religious moderation promotion training program for counselors and teachers resulted in several main things that need to be evaluated. Among the problems found in implementing this training are: First, moderation training has not been able to reach a wide range of participants due to limited quotas and priorities for civil servant employees. Second, the results of measuring the attitudes and understanding of moderation of civil servants and non-civil servants at the Ministry of Religious Affairs are not much different. Third, the results of measuring attitudes and understanding of religious moderation of teachers are lower than those of counselors. Fourth, the main duties and functions of teachers and counselors are different, but both are required to master the same religious moderation. In explaining these matters, the author uses the bibliographic method. This article attempts to formulate several policy recommendations that can be used by the Ministry of Religious Affairs regarding programs to strengthen religious moderation. The conclusion of this article is that a review of standard operational procedures for implementing religious moderation training is needed and regulations from the Directorate General of Islamic Education are needed that encourage active meeting spaces for teachers under the Ministry of Religious Affairs.

Keywords: Policy, Religious Moderation, Extension, Teacher

**OPTIMALISASI MODERASI BERAGAMA
PENYULUH DAN GURU MELALUI
FORUM RUANG PERJUMPAAN**

Aktor utama Kementerian Agama yang patut diprioritaskan untuk mendapatkan penguatan moderasi beragama adalah penyuluh dan guru. Pengukuran pelaksanaan program pelatihan penggerak moderasi beragama terhadap penyuluh dan guru menghasilkan beberapa hal utama yang perlu dievaluasi. Di antara temuan masalah dalam pelaksanaan pelatihan ini sebagai berikut. Pertama, pelatihan moderasi belum mampu menjangkau peserta yang luas karena keterbatasan kuota dan prioritas pegawai PNS. Kedua, hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi pegawai PNS dan non PNS Kementerian Agama tidak jauh berbeda. Ketiga, hasil pengukuran sikap dan pemahaman moderasi beragama guru lebih rendah dibandingkan penyuluh. Keempat, tugas pokok dan fungsi antara guru dan penyuluh berbeda, tetapi keduanya dituntut menguasai moderasi beragama yang sama. Berdasar beberapa masalah tersebut, menggunakan metode kepustakaan, tulisan ini berusaha merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh Kementerian Agama terkait program penguatan moderasi beragama. Simpulan tulisan ini adalah, dibutuhkan pengkajian kembali standar operasional prosedur pelaksanaan pelatihan moderasi beragama, serta diperlukan regulasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang mendorong keaktifan ruang perjumpaan bagi guru di bawah Kementerian Agama.

Kata Kunci: Kebijakan, Moderasi Beragama, Penyuluh, Guru

Ihsan Bayu Merdeka
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Email: bayu@kemenag.go.id

**INEFFICIENCY IN THE ISSUANCE
OF PHYSICAL MARRIAGE CARDS IN
PUBLIC SERVICES AT THE OFFICE OF
RELIGIOUS AFFAIRS (KUA)**

Marriage registration services are a mandate carried out by the Ministry of Religious Affairs, particularly through the Office of Religious Affairs (KUA). For each marriage event, in addition to being recorded in the marriage certificate, it is also provided in the form of a book submitted after the marriage ceremony. In 2018, the Ministry of Religious Affairs issued the Marriage Card as a complement to the marriage book, considering it would facilitate the mobility of couples as authentic proof of marital status. In practice, approximately 2 million marriage cards are distributed each year, with budget assumptions for the procurement of card printing machines amounting to IDR 118.9 billion, which would be fulfilled in at least nine years. The annual printing cost is IDR 21.9 billion, with maintenance costs of IDR 2.9 billion per year. The objective of this policy paper is to evaluate the efficiency of budget utilization related to the issuance of physical marriage cards, with a focus on annual distribution, printing costs, and maintenance. Additionally, this policy paper employs a quantitative method to reveal the importance of careful budget management in supporting quality and accountable public services. The research concludes that the issuance of physical marriage cards is inefficient from a budgetary perspective and could result in a massive financial burden. Furthermore, the policy paper recommends an alternative solution through the utilization of digital cards, adapting to the technological needs of the tech-savvy millennial generation. The policy implications related to these findings will be discussed in more detail within this paper.

Keywords: Public Service, Marriage Card, Effectiveness, Budget

**INEFISIENSI PENERBITAN KARTU
NIKAH FISIK PADA LAYANAN PUBLIK
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

Layanan pencatatan pernikahan merupakan mandat yang dijalankan oleh Kementerian Agama, khususnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Setiap peristiwa pernikahan, selain dicatat pada akta nikah, juga diberikan dalam bentuk buku yang diserahkan pasca terlaksananya akad nikah. Pada tahun 2018, Kementerian Agama menerbitkan Kartu Nikah sebagai pelengkap buku nikah dengan pertimbangan memfasilitasi mobilitas pasangan sebagai bukti otentik status pernikahan. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 2 juta kartu nikah didistribusikan setiap tahun, dengan asumsi kebutuhan anggaran untuk pengadaan mesin cetak kartu senilai 118,9 miliar Rupiah yang akan terpenuhi paling cepat selama sembilan (9) tahun, biaya cetak per tahun 21,9 miliar, serta biaya pemeliharaan melekat per tahun senilai 2,9 miliar Rupiah. Tujuan makalah kebijakan ini adalah mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran terkait penerbitan kartu nikah fisik, dengan fokus pada distribusi tahunan, biaya cetak, dan pemeliharaan. Selain itu, makalah kebijakan ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengungkap pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dalam mendukung layanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Penelitian ini menyimpulkan penerbitan kartu nikah tidak efisien ditinjau dari perspektif anggaran yang akan berimplikasi beban anggaran secara massif. Lebih lanjut, makalah kebijakan ini merekomendasikan solusi alternatif melalui pemanfaatan kartu digital dengan mengadaptasi kebutuhan generasi milenial yang *tech savvy*. Implikasi kebijakan yang terkait dengan temuan ini akan dibahas secara lebih rinci dalam makalah ini.

Kata Kunci: Digitalisasi, Kartu Nikah, Efektifitas, Efisiensi, Peningkatan Layanan

Marliza

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

Email: marliza.st@gmail.com

**TOWARDS EFFICIENT AND
EQUITABLE HAJJ: OPTIMIZING
THE REGISTRATION SYSTEM AND
MANAGEMENT OF HAJJ WAITING LIST
IN WEST JAVA**

The Hajj pilgrimage is the fifth pillar of Islam that is dreamed of by every Muslim throughout the world. In Indonesia, enthusiasm for performing the Hajj is very high, but it is accompanied by a long waiting list that can last for decades. This causes various problems and injustices for Hajj pilgrims. This policy paper aims to examine the problem of Hajj waiting lists in Indonesia and offer solutions for optimizing the registration system and managing waiting lists more efficiently and fairly. This study uses qualitative methods with literature studies, statistical data analysis, and interviews with relevant stakeholders. The result is that various factors cause long hajj waiting lists, such as limited hajj quotas from the Saudi Arabian government, a registration system that is not yet optimal, and a lack of transparency in managing the waiting list. Therefore, this policy paper offers several solutions for optimizing the registration system and waiting list management, including (1) Increasing the Hajj quota from the Saudi Arabian government through diplomacy and negotiation; (2) Implementation of an integrated and transparent online Hajj registration system; (3) Implementation of a fair and accountable priority system for Hajj pilgrims; and (4) Increasing education and information for Hajj pilgrims regarding waiting lists. The conclusion is that optimizing the registration system and management of the Hajj waiting list through the solutions proposed in this policy paper is expected to create a more efficient and fair Hajj pilgrimage for all Muslims in Indonesia.

Keywords: *Management of Hajj, Waiting List, Efficient, Fair, Registration, Management, System, Policy*

**MENUJU HAJI YANG EFISIEN DAN
BERKEADILAN: OPTIMALISASI SISTEM
PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN
WAITING LIST JEMAAH HAJI DI JAWA
BARAT**

Pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang diimpikan dan didambakan oleh setiap umat Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, antusiasme untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, sehingga jumlah pendaftar melebihi kuota haji yang ditetapkan pemerintah dalam setiap tahunnya, bahkan mencapai puluhan tahun, yang berakibat pada "antrian" dengan masa daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, ketidakefisienan, dan ketidakadilan bagi jemaah haji. *Policy paper* ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan *waiting list* haji di Indonesia dan menawarkan solusi untuk optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* yang lebih efisien dan berkeadilan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, analisis data statistik, dan wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasilnya bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan *waiting list* haji panjang, seperti: keterbatasan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi, sistem pendaftaran yang belum optimal, dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan *waiting list*. Oleh karena itu, *policy paper* ini menawarkan beberapa solusi untuk optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list*, di antaranya: (1) Peningkatan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi melalui diplomasi dan negosiasi; (2) Implementasi sistem pendaftaran haji *online* yang terintegrasi dan transparan; (3) Penerapan sistem prioritas yang adil dan akuntabel bagi jemaah haji; serta (4) Peningkatan edukasi dan informasi kepada jemaah haji terkait *waiting list*. Kesimpulannya bahwa optimalisasi sistem pendaftaran dan pengelolaan *waiting list* haji melalui solusi yang diusulkan dalam *policy paper* ini diharapkan dapat mewujudkan ibadah haji yang lebih efisien dan berkeadilan bagi seluruh umat Muslim di Indonesia.

Kata Kunci: *Jemaah Haji, Waiting List, Efisien, Berkeadilan, Pendaftaran, Pengelolaan, Sistem, Kebijakan*

Andi Febriana Hadi Saputra
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
Email: andifebriana007@gmail.com

**PROACTIVE RELIGIOUS SERVICE
BY THE REGIONAL OFFICE OF
THE KEPULAUAN RIAU MINISTRY
OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE
HINTERLAND REGION OF THE
KEPULAUAN RIAU**

The Ministry of Religious Affairs of Regional Office in the Riau Islands continues to strive to improve services to communities in the hinterland region with a pick-up and drop-off program. This program aims to bring services closer to the community, facilitate access to services, and improve service quality. The types of services available include Hajj and Umrah registration, marriage registration, legalization of marriage certificates, guidance on Hajj rituals, religious counseling, zakat and endowment services, and religious education. The service method used is by sending officers and mobile cars to the hinterland area and collaborating with the local government. This paper uses a qualitative method with an approach to literature study and interviews in the field. The results show that this program is beneficial for the community because they no longer need to travel long distances to get Ministry of Religious Affairs services, thereby saving time and money. This program still faces several challenges, such as the vast and remote hinterland area, limited infrastructure, and lack of human resources. The Ministry of Religious Affairs of Regional Office in the Riau Islands continues to strive to improve the quality of this program. The ball pick-up program is the right effort to improve services to communities in the hinterland region and is expected to provide benefits to communities in the region.

Keywords: *Pick-Up and Drop-Off Services, Religious Services, Hinterland Communities*

**PELAYANAN KEAGAMAAN JEMPUT
BOLA OLEH KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA KEPULAUAN
RIAU DI WILAYAH HINTERLAND
KEPULAUAN RIAU**

Kanwil Kemenag Kepri terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah *hinterland* dengan program jemput bola. Program ini bertujuan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, mempermudah akses layanan dan meningkatkan kualitas layanan. Jenis layanan yang tersedia meliputi: pendaftaran haji dan umrah, pendaftaran nikah, pengesahan surat nikah, bimbingan manasik haji, penyuluhan agama, pelayanan zakat dan wakaf, serta pendidikan keagamaan. Metode pelayanan yang digunakan adalah dengan menurunkan petugas dan mobil keliling ke wilayah *hinterland*, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi pustaka dan wawancara di lapangan. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini bermanfaat bagi masyarakat karena mereka tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan Kemenag, sehingga menghemat waktu dan biaya. Program ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti wilayah *hinterland* yang luas dan terpencil, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia, Kanwil Kemenag Kepri terus berusaha untuk meningkatkan kualitas program ini. Program jemput bola merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah *hinterland* dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Layanan Jemput Bola, Layanan Keagamaan, Masyarakat Hinterland*